



## BAB VIII

# INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAN KEBUTUHAN PENDANAAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Jambi Tahun 2013-2018 diimplementasikan melalui berbagai bentuk program yang mencerminkan kebutuhan pembangunan yang mendesak. Sejumlah program tersebut tidak seluruhnya dapat terpenuhi secara optimal, mengingat keterbatasan potensi, sumber daya seperti dana, tenaga dan kemampuan manajerial. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemilahan program-program pembangunan guna tersusunnya program prioritas yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dan hak-hak dasar masyarakat serta pencapaian keadilan yang berkesinambungan dan berkelanjutan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Jambi Tahun 2013-2018 memuat tiga program unggulan sebagai bahasa implementasi dalam rangka pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan, dan dikelompokkan dalam empat sorotan aspek dengan rencana program-program prioritas yang diindikasikan sebagai solusi dalam rangka pencapaian tujuan melalui sasaran-sasaran yang telah ditetapkan.

Ada tiga program yang diunggulkan dalam periode lima tahun mendatang, yaitu (1) peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam rangka peningkatan daya saing daerah (2) pemberdayaan ekonomi rakyat berbasis perdagangan dan jasa serta (3) peningkatan daya dukung infrastruktur perkotaan dalam rangka pencapaian kualitas sumber daya manusia dan pemberdayaan ekonomi rakyat. Sedangkan empat aspek yang menjadi sorotan sebagai pemetaan atas kondisi kekinian meliputi aspek tata ruang, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan serta aspek daya saing.



Indikasi rencana program-program prioritas tersebut membutuhkan pendanaan yang proporsional sesuai tingkat urgensi dan kemendesakan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Jambi 2013-2018. Secara garis besar struktur anggaran belanja daerah terpilah menjadi belanja tidak langsung dan belanja langsung.

Komponen belanja tidak langsung meliputi : (a) belanja pegawai, (b) belanja bunga, (c) belanja hibah, (d) belanja bantuan sosial, (e) belanja bagi hasil, (f) belanja bantuan keuangan dan (g) belanja tidak terduga. Sedangkan belanja langsung terdiri dari tiga komponen, yaitu belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal yang melekat pada setiap kegiatan sebagai implementasi atas program-program prioritas.

Dalam konteks ini kebutuhan pendanaan lebih dititikberatkan pada pengalokasian persentase anggaran belanja untuk program-program prioritas yang merupakan bagian dari belanja langsung dan tidak langsung non gaji. Dengan demikian, besarnya persentase anggaran untuk masing-masing program prioritas diperoleh dari total anggaran belanja daerah setelah dikurangi belanja tidak langsung dari komponen belanja pegawai. Proyeksi persentase alokasi anggaran untuk masing-masing program prioritas dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :